



Analisis

Bebas Akses

KEBEBASAN BERKESENIAN

Seni di Negeri yang Susah Melucu

Seni itu cerminan realitas sosial dan politik. Pembatasan seni dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mengkritisi dan merefleksikan diri mereka.

Audio Berita 8 menit

Oleh **ARIS SETIAWAN**

7 Januari 2024 09:00 WIB · 4 menit baca



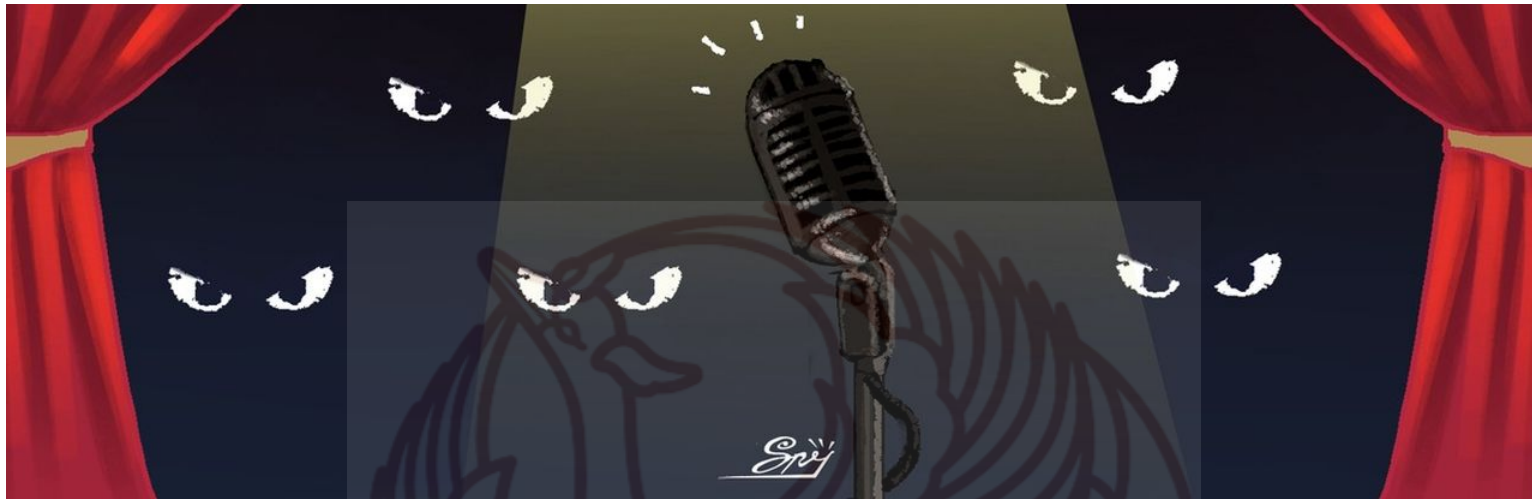
Menu

Cari



Berlangganan

Daftar



SUPRIYANTO

Ilustrasi

Surat Pembaca *Kompas* edisi 6 Desember 2023 yang berjudul "Apakah Seni Harus Permissi" menarik untuk dicermati lebih jauh. Surat pembaca itu merespons kegalauan seorang seniman ternama, [Butet Kartaredjasa](#), yang mengalami kendala sebelum mempergelar pentas teater di Taman Ismail Marzuki pada 1-2 Desember 2023. Aparat keamanan meminta Butet menandatangani pernyataan yang menyatakan bahwa karyanya tidak boleh berbicara, menyinggung, atau bersentuhan dengan masalah politik.

[Fenomena](#) ini mencuatkan isu baru dalam dunia [kebebasan berekspresi](#), terutama di negara yang konon menganut prinsip demokrasi. Seni, yang selama ini dianggap sebagai [Baca di Aplikasi](#) bas dari intervensi politik,

[Menu](#)[Cari](#)[Berlangganan](#)[Daftar](#)

Sebagaimana kita ketahui, musik, wayang, tari, hingga *stand-up comedy* seharusnya dipandang sebagai karya-karya yang bebas diekspresikan. Muatan satire dan komedi di dalam seni seharusnya dimaknai sebagai bagian dari keunikan karya seni itu sendiri.

Namun, dengan adanya tekanan terhadap seniman untuk menjauhi masalah politik, kebebasan seni menjadi terancam. Idealnya, [kritik sosial](#) yang diungkapkan melalui seni dianggap sebagai refleksi kolektif masyarakat. Seni seharusnya menjadi potret kehidupan sosial di zamannya, bukan hanya sekadar hiburan tanpa makna.

Baca juga: [Polisi Bantah Intimidasi, tetapi Butet Kartaredjasa Diminta Tanda Tangan Pernyataan Tak Bicara Politik](#)

Kasus

Harus diakui, pada masa pemilu, semua aspek kehidupan, termasuk seni, menjadi sensitif. Wilayah-wilayah yang seharusnya steril dari intervensi politik mulai dilirik dan diwaspadai. Keprihatinan seniman seperti Butet Kartaredjasa mencerminkan kekhawatiran terhadap pembatasan kebebasan berekspresi.

Mereka, sebagai warga masyarakat, memiliki hak sama dengan pihak lain untuk menyatakan pendapat, sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Kebebasan berekspresi, seperti yang terdapat dalam koridor hukum, moral,

Baca di Aplikasi

kebebasan seni ke depannya.



KOMPAS

Setelah 41 kali pentas, baru kali ini Butet Kartaredjasa diminta tanda tangan surat tertulis ke polisi.

Terdapat beberapa kasus serupa di beberapa negara di dunia, di mana seniman sering kali dilarang atau diintimidasi karena karya-karya mereka dianggap menentan [Baca di Aplikasi](#) Rusia, misalnya, seniman

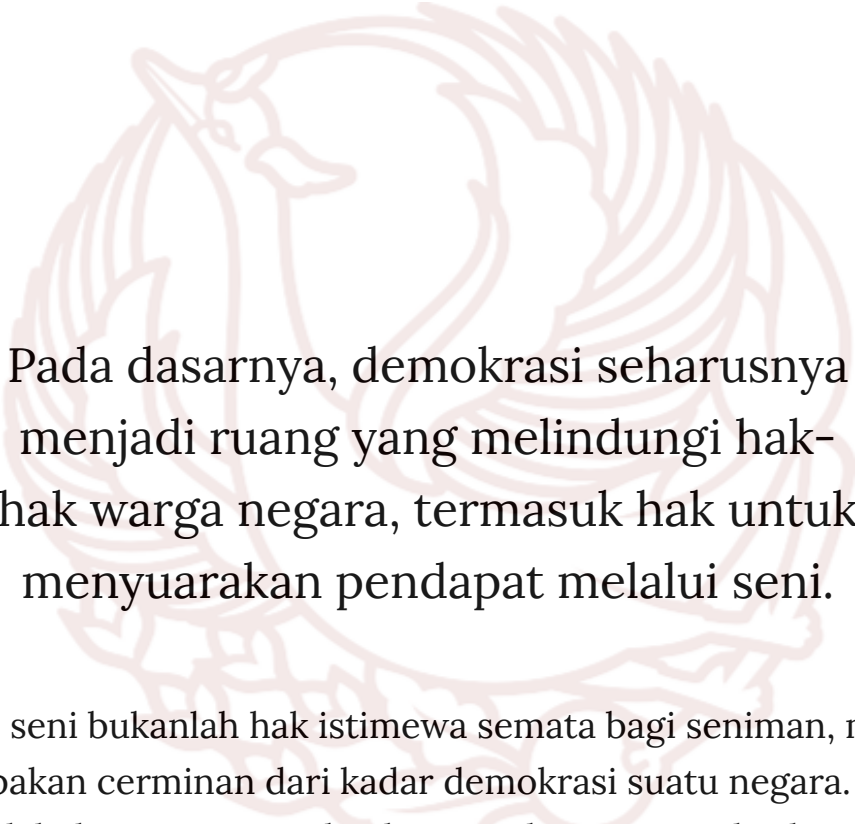
[Menu](#)[Cari](#)[Berlangganan](#)[Daftar](#)

tempat umum. Mereka menghadapi tekanan dari pemerintah yang tidak menoleransi kritik terhadap kebijakan yang ada. Hal serupa juga terjadi di Tiongkok, di mana seniman dan aktivis sering kali dibatasi dalam berekspresi, dan karya seni yang dianggap mengancam stabilitas politik dapat dihapus atau dilarang (Andrew Solomon, 1998).

Di Arab Saudi, seniman Raif Badawi telah dipenjara dan dihukum cambuk karena menulis blog yang dianggap menyentuh isu-isu agama dan politik. Kasus Badawi mencerminkan betapa rentannya seniman terhadap hukuman keras dalam lingkungan yang tidak menghargai kebebasan berekspresi.

Selain itu, di Amerika Serikat, meskipun dianggap sebagai negara yang menganut kebebasan berbicara, ada kontroversi mengenai penggunaan kekuasaan politik untuk membatasi seniman. Misalnya, pada beberapa acara penghargaan seperti Academy Awards, ada tekanan untuk menjaga agar seniman tidak menyuarakan pandangan politik mereka secara terbuka, menciptakan debat tentang sejauh mana seniman dapat memanfaatkan panggung mereka untuk menyampaikan pesan sosial atau politik.

Baca di Aplikasi



Pada dasarnya, demokrasi seharusnya menjadi ruang yang melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk menyuarakan pendapat melalui seni.

Kebebasan seni bukanlah hak istimewa semata bagi seniman, melainkan juga merupakan cerminan dari kadar demokrasi suatu negara. Ketika seniman tidak dapat mengungkapkan pandangan mereka, berarti ada masalah dalam [sistem demokrasi](#) dan perlindungan hak asasi manusia.

Bagi Indonesia, perlu dipertimbangkan apakah pembatasan terhadap kebebasan seni merupakan langkah yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keberagaman. Baca di Aplikasi [Kompas](#) mengenai pembatasan

Menu

Cari



Berlangganan

Daftar

mengenai substansi demokrasi dan toleransi dalam berbagai konteks budaya.

Saat sebuah masyarakat mulai mengalami pembatasan terhadap [ekspresi seni](#), kita harus bertanya-tanya apakah ini merupakan indikasi dari demokrasi yang rapuh atau ketidakmampuan negara untuk mengakomodasi kebebasan individu. Pada dasarnya, demokrasi seharusnya menjadi ruang yang melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk menyuarakan pendapat melalui seni.



Baca di Aplikasi

[Menu](#)[Cari](#)[Berlangganan](#)[Daftar](#)

Suasana peluncuran sistem pemantauan kebebasan berkesenian, kebebasanberkesenian.id, di Jakarta, Rabu (10/5/2023). Sistem ini digunakan untuk mendata kasus-kasus pelanggaran kebebasan berkesenian yang dilaporkan langsung oleh masyarakat, utamanya pelaku seni.

Cermin realitas sosial

Seni adalah cerminan realitas sosial dan politik. Pembatasan terhadap seni dapat membawa dampak lebih luas, yakni terhambatnya kemampuan masyarakat untuk mengkritisi dan merefleksikan diri mereka sendiri. Demokrasi yang sehat seharusnya mampu mengatasi tantangan dan kritik internal, termasuk melalui karya seni yang bisa memicu diskusi publik positif.

Ketidaksetujuan terhadap suatu karya seni adalah bagian alami dari kehidupan demokratis, dan wajar jika masyarakat memiliki pendapat beragam terkait dengan berbagai karya seni. Namun, penindasan dan pembatasan atas seni yang bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis dapat merusak esensi demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, dialog terbuka dan inklusif menjadi kunci untuk menyelesaikan ketidaksetujuan dan merawat [keberagaman pendapat](#) dalam masyarakat.

Kritik sosial melalui seni seharusnya dilihat sebagai kontribusi berharga untuk memperbaiki demokrasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan seni harus diperkuat, bukan dihambat. Kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ru [Baca di Aplikasi](#) untuk berekspresi secara

[Menu](#)[Cari](#)[Berlangganan](#)[Daftar](#)

Kebebasan seni menandai sejauh mana masyarakat dapat mengakomodasi perbedaan pendapat dan kritik. Fenomena pembatasan kebebasan seni di Indonesia, seperti yang dialami oleh Butet, memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi oleh seniman dalam mengekspresikan pandangan mereka tanpa takut akan represi.

Baca juga: [Ada 33 Pelanggaran Kebebasan Berkesenian Sepanjang 2022](#)

Tindakan represif terhadap seniman tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga merugikan masyarakat yang kehilangan kontribusi berharga seni sebagai cerminan kritis terhadap realitas sosial dan politik. Kebebasan seni bukanlah konsep yang statis; ia berkembang seiring waktu dan perubahan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah terlibat dalam diskusi untuk mengeksplorasi batas-batas kebebasan seni yang dapat diterima dalam konteks budaya dan politik tertentu.

Dalam menghadapi tantangan terhadap kebebasan seni, publik perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pembatasan tersebut terhadap dinamika demokrasi dan keberagaman budaya. Dengan memahami bahwa seni memiliki peran kritis dalam membentuk pemikiran dan refleksi kolektif, perlindungan terhadap kebebasan seni menjadi esensial bagi masyarakat yang ingin menjaga ekosistem demokrasi yang sehat, inklu. Baca di Aplikasi [Kompas](#) dan [Kompas](#) [Android](#) dan [iOS](#).

Menu

Cari



Berlangganan

Daftar

dibungkam, betapa rapuhnya dunia seni hari ini bagi negeri yang tak suka melucu. Aduh!

[Aris Setiawan](#), Etnomusikolog, Pengajar di [ISI Surakarta](#)



ARSIP PRIBADI

Aris Setiawan

Baca di Aplikasi

Menu

Cari




Berlangganan

Daftar

analisis kebebasan berekspresi fenomena utama butet kartaredjasa isi surakarta pemilu 2024 kritik sosial sistem demokrasi analisis ahli aris setiawan opini aris setiawan ekspresi seni opini pemilu keberagaman pendapat

Komentar Pembaca



Kirimkan Komentar Anda

Jadilah yang pertama memberikan komentar. Silakan masuk atau daftar akun untuk menggunakan fitur komentar.

Daftar Sekarang

Masuk

Belum ada komentar.

Baca di Aplikasi

Menu

Cari



Berlangganan

Daftar

ALUMEL TERKAL



Baca di Aplikasi

Menu

Cari



Berlangganan

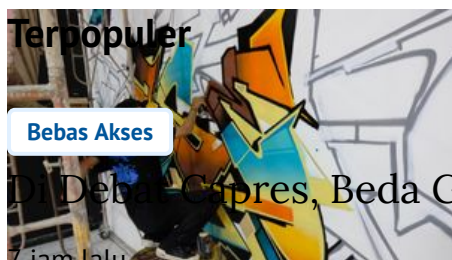
Daftar



2 Agustus 2023



15 Desember 2023



Terpopuler

Bebas Akses

Di Depan Cipres, Beda Gaya Komunikasi Anies, Prabowo, dan Ganjar Makin Terlihat
7 jam lalu

Goresan Kebebasan Seniman Grafiti

22 September 2023



Puncak Macet Saat Akhir Tahun, Masih Ada Wisata Alternatif

27 Desember 2023



Ratusan Kendaraan Curian Ditemukan di Gudang TNI AD di

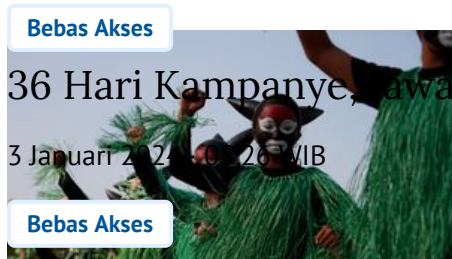
19 jam lalu

Menyelisik Kecelakaan Dua Kereta Api

5 jam lalu

Teater Politik dan Komodifikasi Kebudayaan

14 November 2023



Bebas Akses

36 Hari Kampanye, Jawa dan Sumatera Paling Banyak Dikunji

3 Januari 2024, 09:26 WIB

Bebas Akses

Buka Ruang Ekspresi, Tingkatkan Kesejahteraan Seniman Tradisi

15 September 2023



26 Desember 2023 : 10:06 WIB

Seni Tradisi, Riwayatmu Kini

26 September 2023

Baca di Aplikasi

Menu

Cari



Berlangganan

Daftar

Lainnya Dalam Opini



Baca di Aplikasi

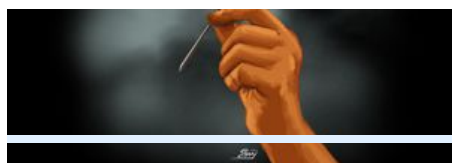
Menu

Cari



Berlangganan

Daftar



Tanggung Jawab Jurnalis

2 jam lalu



5 jam lalu

Terbaru



Presiden Joko Widodo Resmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere

15 menit lalu

Tantangan Nakhoda Baru Bulog

5 jam lalu



Bebas Akses

Ilusi Kenegarawanan

6 jam lalu

Beragam Cara Menjaga Kesehatan Jiwa

49 menit lalu

Analisis

Bebas Akses

Persona Daring Para Capres di Media Sosial

49 menit lalu

Menyelidik Kecelakaan Dua Kereta Api

5 jam lalu

Mengunjungi Shenzhen, Contoh Kecil Hubungan Besar antara

2 jam lalu

Analisis

Hezbollah Balas Serangan Israel Seusai Tewasnya Pemimpin

2 jam lalu

Ketahanan Energi Kita

1 jam lalu



Analisis

Bebas Akses

Bolehkah Presiden Berkampanye?

5 jam lalu

Baca di Aplikasi

[Menu](#)

[Cari](#)



[Berlangganan](#)

[Daftar](#)

Kantor Redaksi

Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.

+6221 5347 710

+6221 5347 720

+6221 5347 730

+6221 530 2200

Produk

[ePaper](#)

[Kompas.id](#)

[Interaktif](#)

[Kompas Data](#)

[Kompaspedia](#)

Bisnis

[Advertorial](#)

[Gerai](#)

[Event](#)

[Klasika](#)

[Klasiloka](#)

[Iklan](#)

Kantor Iklan

Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.

+6221 8062 6699

Tentang

[Profil Perusahaan](#)

[Sejarah](#)

[Organisasi](#)

Lainnya

[Bantuan](#)



[Baca di Aplikasi](#)

Menu

Cari



Berlangganan

Daftar



+6221 2567 6000



Whatsapp

+62812 900 50 800



Email

hotline@kompas.id

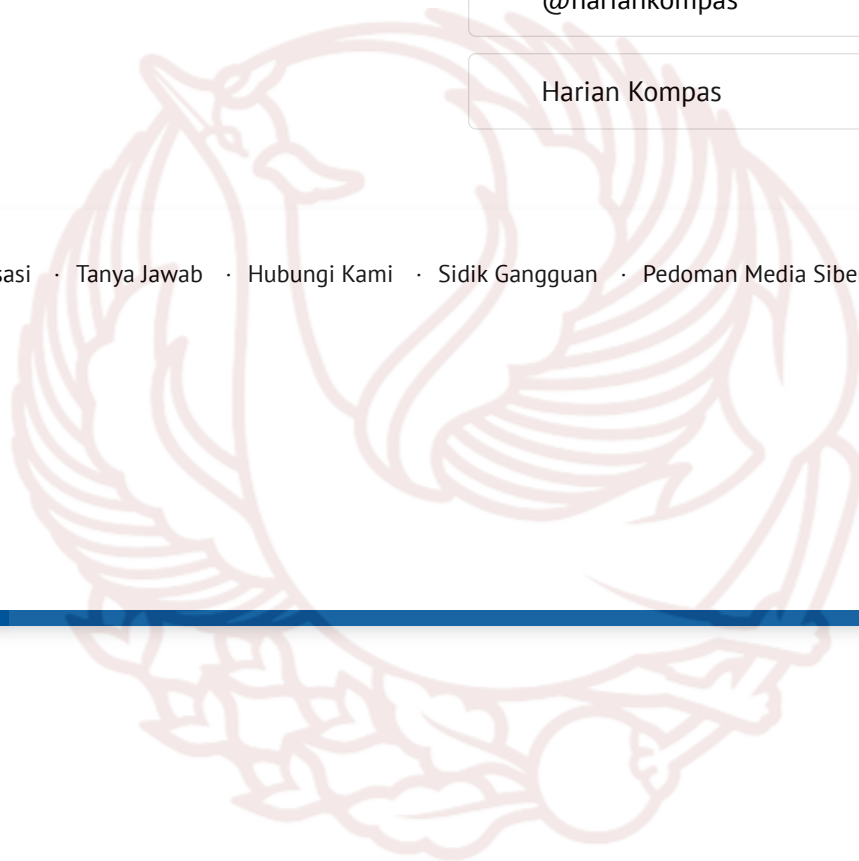
@hariankompas

@hariankompas

@hariankompas

Harian Kompas

© 2024 PT Kompas Media Nusantara · Organisasi · Tanya Jawab · Hubungi Kami · Sidik Gangguan · Pedoman Media Siber · Syarat & Ketentuan ·
Karier · Iklan · Berlangganan ·



Baca di Aplikasi